

Title : Serumpun dengan Keluhan, tetapi Tetap Cuan walau beda Tuan

Author(s) : Arinita Permata Putri, Adel Amelia Meilinda, Laili Zabrina

Institution : Universitas Lampung

Category : Article

Topics : Philosophy, Humanities, Culture

Serumpun dengan Keluhan, tetapi Tetap Cuan Walau Beda Tuan

Disusun Oleh:

Arinita Permata Putri, Adel Amelia Meilinda, Laili Zabrina

Sudah biasa jika di dalam suatu hubungan baik secara individu maupun antarkelompok mengalami sebuah konflik, bahkan tidak jarang juga negara-negara yang serumpun mengalami hal ini. Pastinya disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara lain: posisi geografis yang sangat dekat, memiliki banyak kesamaan dalam berbudaya dan berbahasa, serta perbedaan ideologi politik yang dipakai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut terdapat berbagai akibat yang dapat ditimbulkan sehingga memicu konflik antarwarga negara serumpun. Seperti yang sering kita lihat di media sosial banyak sekali perseteruan pengguna yang berasal dari negara Indonesia dan Malaysia berseteru mengenai pengklaiman budaya. Hal tersebut memicu provokasi dari pihak internal maupun eksternal yang tidak bertanggung jawab hingga dapat melunturkan nilai persatuan. Konflik-konflik yang terjadi pastinya sangat memengaruhi hubungan kerjasama antarnegara serumpun baik secara politik, ekonomi, serta budaya.

Namun, di sisi lain setiap negara pastinya tidak dapat hidup sendiri, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara akan membutuhkan bantuan dari negara lain. Beberapa konflik antarnegara serumpun lambat laun mereda karena adanya kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama Malaysia dengan Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak dahulu, contoh kecilnya ialah pada masa Orde Baru ketika keluar Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tepatnya pada tanggal 12 Maret 1966 yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI adalah sebuah organisasi yang terlarang. Menurut Rucinawati dalam tesis berjudul 'Pasukan Gerilya Rakyat/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/PARAKU)' karena mengingat wilayah tersebut mendekati negara seberang, akhirnya Indonesia dan Malaysia bekerja sama memberlakukan pembersihan karena komunis dianggap sebagai musuh bersama. Tidak hanya itu saja, dikutip pada laman 'Siaran pers No. 333/HM/KOMINFO/08/2022, Jum'at, 19 Agustus 2022 tentang Perjuangkan Kepentingan Asean, Menkominfo: Indonesia dan Malaysia Saling Dukung di Forum ITU.' Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia dan Malaysia akan saling memberikan dukungan untuk memperjuangkan kebijakan dan tata kelola telekomunikasi universal. Banyak kerja sama yang sudah terjalin, seharusnya persatuan dan persaudaraan semakin kokoh, menegur tanpa bentur, menasihati tanpa provokasi, konflik-konflik yang berlalu lalang harus bisa teratasi karena mengingat kedekatan antara negara serumpun ini.

Pemerintah juga seharusnya mengadakan hubungan diplomasi yang diisi sebuah perundingan untuk membahas konflik atau isu-isu yang merebak dengan diiringi rasa kesadaran serta mengimplementasikan makna dari kata 'serumpun' itu sendiri. Lalu, apa definisi dari kata 'serumpun' itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata serumpun adalah sekumpulan (sekelompok) yang berasal dari satu induk (tentang tumbuhan, bahasa). Arti lainnya yaitu, serumpun berasal dari nomina (kata benda), sekumpulan (sekelompok) yang berasal dari satu keturunan dan garis darah, satu kebudayaan, satu nenek moyang, satu keturunan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa serumpun merupakan kata yang menggambarkan adanya sebuah satu kesatuan dimulai dari keturunan, darah, bahasa, bahkan kebudayaan. Tujuan adanya kegiatan bahkan kerja sama antar serumpun tidak hanya demi menunjang ekonomi negara anggota saja, melainkan untuk memperjelas kebudayaan bahkan adat istiadat supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pengakuan kebudayaan. Paham akan adanya rasa

persaudaraan yang menjadi ajang untuk bersanding bukan untuk bersaing, menyelesaikan segala konflik tanpa provokasi serta melakukan observasi cikal bakal dari konflik tersebut supaya hal yang sudah terjadi tidak terulangi lagi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam penyelesaian dari sebuah konflik antar lain:

1. **Lumping it.** Terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutanannya. Dengan kata lain isu yang dilontarkan diabaikan (simply ignored) dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan.
2. **Avoidance or exit.** Mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (powerlessness) salah satu pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi atau psikologis.
3. **Coersion.** Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain.
4. **Negotiation.** Kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (mutual settlement) tanpa melibatkan pihak ketiga.
5. **Conciliation.** Mengajak (menyatukan) kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan.
6. **Mediation.** Pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
7. **Arbitration.** Bilamana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga.
8. **Adjudication.** Apabila persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Memahami konflik serta paham akar dari suatu permasalahan sangat diperlukan dengan begitu mempermudah dalam mencari penyelesaian serta cepatnya terlaksana tujuan bahkan cita-cita dari sebuah negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat tercantum dengan jelas salah satu tujuan negara ialah, "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social." Salah satu cara mewujudkan tujuan negara dengan membuka mata dunia bahwa kita berhak mendapatkan apa yang kita inginkan. Mengikuti hubungan bilateral dan multilateral, ikut serta dalam peran kehidupan dunia, ikut serta dalam kedamaian baik dalam hubungan internal dan eksternal, menjunjung tinggi rasa peduli terhadap ruang lingkup sosial dan dunia, serta menjalankan tugas-tugas negara baik sebagai masyarakat sipil, otoriter, pemegang kuasa pada hubungan dalam dan luar negeri untuk kepentingan kedamaian.

Dengan demikian, konflik antar negara serumpun bahkan dunia dapat dicegah dengan menaati perjanjian antar negara, memiliki dan menerapkan nilai-nilai untuk kepentingan bersama, tidak mudah terprovokasi, transparan terhadap sebuah isu, mencari solusi bukan pengalihan, memberi solusi bukan memaki, saling menguatkan dan menghargai antar hubungan negara, tidak menyudutkan salah satu pihak serta paham makna dari sebuah 'kerja sama'.